BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Berlakunya kedua undang-undang tersebut di atas membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Hal tersebut dapat dipenuhi dengan menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) seperti yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 (1) dan (2) yaitu, pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut juga dengan anggaran berbasis kinerja (ABK).

Undang-Undang Nomor 17 menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja. APBD berbasis kinerja yang disusun oleh penda harus didasarkan pada SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Anggaran tidak dapat dipisahkan dari sistem perencanaan, disamping memang anggaran itu sendiri merupakan sebuah rencana. Dalam suatu sistem perencanaan, anggaran merupakan muara akhir. Perencanaan dimulai dari perencanaan panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan tahunan. Terlepas dari perdebatan tentang sistem perencanaan yang cenderung tidak membumi (tidak nyata), namun suatu sistem anggaran seharusnya dapat ditarik benang merahnya dari proses perencanaan sebelumnya. (Andayani, 2007)

Anggaran merupakan salah satu instrumen utama dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Selain anggaran, instrumen lain untuk melaksanakan kebijakan antara lain sumber daya manusia (SDM), peralatan, metologi pelaksanaan kebijakan dan lain-lain. Namun instrumen di luar anggaran tersebut akan dapat berjalan jikalau ada dukungan anggaran. Penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pelaksanaan penyempurnaan manajemen keuangan, yang bertujuan untuk meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik serta efektivitas dari pelaksanaan kebijakan dan program. (Anggraini, 2010)

Penyusunan anggaran berbasis kinerja mendasarkan prosesnya pada perencanaan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas pengguna anggaran (*budget entity*). Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja organisasi ataupun unit organisasi tidak hanya mewajibkan menyusun fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja tetapi juga merencanakan kegiatan yang ingin dicapai, dalam bentuk keluaran atau terutama hasil program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. (Anggraini, 2010)

Pemerintah Kota Surabaya merupakan salah satu bentuk organisasi yang mengatur jalannya pemerintahan di Surabaya, sebagai sektor publik pemerintah kota Surabaya harus menyediakan layanan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga Surabaya, termasuk mengatur pengelolaan keuangan daerah dan menggunakan hasil dari pengelolaan tersebut untuk memaksimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan pembangunan kota Surabaya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan (Irafahmi, 2009). Pemerintahan kota Surabaya dan SKPD kota Surabaya termasuk daerah otonom yang menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri dan terdesentralisasi. Oleh karena itu, adanya desentralisasi pada pemerintah daerah dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas, maka pemerintah harus menyelenggarakan sistem pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan

efektivitas dan efisiensi kinerja serta dilakukan secara tertib, taat pada peraturan dan bertanggung jawab (Asmoko, 2006).

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya sebagai SKPD yang mengelola keuangan daerah harus dinilai efektivitas dan efisiensi kerjanya dalam mengelola keuangan dan mencapai target-target yang dicapai dalam memaksimalkan pendapatan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menyusun Tugas Akhir dengan judul “**ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA PEMERINTAHAN KOTA SURABAYA**”.

1.2 Penjelasan Judul

Menghindari adanya salah penafsiran judul maka berikut ini akan dijelaskan secara singkat mengenai arti setiap kata. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

ANALISIS

Aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. (Yunanda, 2009)

PENYUSUNAN

Suatu kegiatan memproses data atau kumpulan data yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan secara baik dan teratur (Bastian, 2006).

ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Anggaran yang menghubungkan anggaran negara (pengeluaran negara) dengan hasil yang diinginkan (output dan outcome) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya (Sancoko,dkk, 2008).

PEMERINTAHAN KOTA SURABAYA

Merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, maka dapat disimpulkan rumusan masalah berikut :

Bagaimana proses penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintahan Kota Surabaya ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir ini antara lain:

Mengetahui penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintahan Kota Surabaya.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari penulisan Tugas Akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi untuk mengetahui proses pemerintah dalam menyusun Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintahan Kota Surabaya.

2. Umum, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan tentang Anggaran Berbasis Kinerja yang berkaitan dengan Penerapan (SAP) Sistem Akuntansi Pemerintahan
3. Mahasiswa, penelitian ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan terutama lingkungan Perguruan Tinggi sebagai bahan bacaan untuk memperluas terapan dari pengetahuan yang dipelajari di bangku kuliah, khususnya dalam pendalaman materi mengenai Akuntansi Sektor Publik.

1.6 Metode Penelitian

Pengumpulan data dan informasi menggunakan metode penelitian data sebagai berikut .:

1. Metode wawancara (*Interview*).

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan pihak instansi pemerintah terkait. Wawancara dilaksanakan dengan pegawai di bagian akuntansi pada bidang penganggaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Kota Surabaya.

2. Dokumentasi

Untuk memperoleh data sebagai bahan pendukung dalam melakukan penelitian Tugas Akhir ini maka penulis melakukan pengumpulan data yang bersumber dari catatan dan laporan yang disusun perusahaan, serta buku pendukung lainnya.